



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL DARI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN SE-KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, perlu membentuk Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kecamatan se-Kota Gunungsitoli dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kecamatan se-Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
14. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DARI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SE-KOTA GUNUNGSITOLI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli.
6. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Gunungsitoli.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas Kecamatan adalah Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Kesehatan yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat yang terdapat pada tingkat Kecamatan se-Kota Gunungsitoli.

10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
12. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
13. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman pengelolaan dan pengaturan penggunaan dana non kapitasi JKN pada FKTP milik pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. agar seluruh pendapatan dan belanja daerah yang bersumber dari Dana Non Kapitasi JKN BPJS Kesehatan dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. meningkatkan kendali biaya dan kendali mutu dalam pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pemanfaatan dana non kapitasi;
- b. Pembayaran jasa pelayanan non kapitasi;
- c. Standar tarif non kapitasi; dan
- d. Pengelolaan dana non kapitasi.

Pasal 5

Pengaturan penggunaan Dana Non Kapitasi pada FKTP milik pemerintah daerah, ditujukan bagi FKTP milik pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB III

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Dana Non Kapitasi

Pasal 6

- (1) Dana non kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja FKTP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran Rencana pendapatan dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli.
- (4) Rencana belanja dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran FKTP.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) digunakan untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Dalam hal terdapat sisa Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaatannya dapat digunakan tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan
Pasal 8

- (1) Alokasi dana non kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Calon PNS;
 - b. PNS;
 - c. PPPK;
 - d. Peserta program internship;
 - e. Peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Pegawai non PNS yang dipekerjakan oleh kepala dinas kesehatan selaku pemberi kerja dalam hal PNS dan PPPK tidak memadai,
- yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
- a. jenis pelayanan; dan
 - b. pelaksana kegiatan.
- (4) Pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Berita Acara Kesepakatan antara Dinas Kesehatan dengan Kepala Puskesmas lingkup Kota Gunungsitoli.

Pasal 9

- (1) Variabel jenis pelayanan dan ruang pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Pelayanan	Pelaksana Kegiatan	Persentase pembagian jasa pelayanan
Pelayanan ambulan	Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan	60%
	Manajemen	10%

	Ruang Tindakan Gawat Darurat	10%
	Ruang Persalinan	10%
	Ruang Rawat Inap	10%
Pelayanan Obat Program Rujuk Balik	Ruang Rekam Medis	7%
	Ruang Pemeriksaan Umum	51%
	Ruang Laboratorium	14%
	Ruang Farmasi	15%
	Manajemen	10%
	Pendukung	3%
Pelayanan pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis	Ruang Rekam Medis	7%
	Ruang Pemeriksaan Umum	52%
	Ruang Laboratorium	15%
	Ruang Farmasi	13%
	Manajemen	10%
	Pendukung	3%
Skrining Kesehatan tertentu dhi ; Pemeriksaan inspeksi visual asam asetat (IVA-test) untuk penyakit kanker leher Rahim	Ruang Rekam Medis	5%
	Ruang Farmasi	5%
	Ruang Kesehatan Ibu dan KB	75%
	Manajemen	12%
	Pendukung	3%
<i>Ante Natal Care</i> (ANC)	Ruang Rekam Medis	5%
	Ruang Laboratorium	10%
	Ruang Kesehatan Ibu dan KB	0-62%
	Bidan Desa	0-62%

	Manajemen	20%
	Pendukung	3%
Skrining Kesehatan tertentu dhi ; Pemeriksaan inspeksi visual asam asetat (IVA-test) untuk penyakit kanker leher Rahim	Ruang Rekam Medis	5%
	Ruang Kesehatan terkait	10%
	RuangKesehatan Ibu dan KB	75%
	Manajemen	12%
	Pendukung	3%
Pelayanan terapi krio	Ruang Rekam Medis	7%
	Ruang Kesehatan Ibu dan KB	55%
	Ruang Laboratorium	25%
	Manajemen	10%
	Pendukung	3%
Pelayanan rawat inap	Ruang Rekam Medis	7%
	Ruang rawat inap	48%
	Ruang Pemeriksaan Umum/Ruang Anak dan Imunisasi/Ruang Pemeriksaan Khusus	5%
	Ruang Tindakan Gawat Darurat	14%
	Ruang Farmasi	7%
	Ruang Laboratorium	1%
	Gizi	1%
	Manajemen	12%
	Pendukung	5%
Pelayanan kebidanan dan neonatal	Ruang Rekam Medis	6%
	Ruang persalinan	40%

	Ruang Laboratorium	1%
	Ruang Rawat Inap Pasca Persalinan	22%
	Ruang Tindakan Gawat Darurat	5%
	Ruang Farmasi	5%
	Manajemen	12%
	Pendukung	3%
	Bidan Desa	5%
	Gizi	1%
Pelayanan kontrasepsi	Ruang Rekam Medis	5%
	Ruang Kesehatan Ibu dan KB	0-75%
	Bidan Desa	0-75%
	Manajemen	12%
	Pendukung	3%
	Ruang Farmasi	5%
Pelayanan protesa gigi	Ruang Rekam Medis	7%
	Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut	80%
	Manajemen	10%
	Pendukung	3%

- (2) Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam program, kegiatan, subkegiatan dan belanja FKTP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Standar Tarif Non Kapitasi
Pasal 10

Tarif Non Kapitasi diberlakukan untuk pelayanan yang mencakup:

- a. pelayanan ambulans;
- b. pelayanan obat program rujuk balik;

- c. pelayanan pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis;
- d. skrining kesehatan tertentu termasuk:
 - 1) pemeriksaan inspeksi visual asam asetat (IVA-test) untuk penyakit kanker leher rahim;
 - 2) pemeriksaan *pap smear* untuk penyakit kanker leher rahim;
 - 3) pemeriksaan gula darah untuk penyakit diabetes mellitus;
 - 4) pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk penyakit thalassemia; dan
 - 5) pemeriksaan *rectal touche* dan darah samar feses untuk penyakit kanker usus
- e. pelayanan terapi krio untuk kanker leher rahim;
- f. pelayanan rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis;
- g. pelayanan kebidanan dan neonatal, termasuk pengambilan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya;
- h. pelayanan kontrasepsi;
- i. pelayanan protesa gigi.

Pasal 11

- (1) Tarif Non Kapitasi pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan pada pelayanan ambulans untuk pasien rujukan dengan kondisi tertentu dari FKTP ke FKTP lain atau ke FKRTL disertai dengan upaya menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.
- (2) Tarif pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar tarif ambulans yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli.
- (3) Tarif pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP yang merujuk.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur penggantian biaya untuk pelayanan ambulans diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Tarif Non Kapitasi pelayanan obat program rujuk balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan untuk pelayanan penyakit kronis meliputi diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung, asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), epilepsi, gangguan kesehatan jiwa kronik, *stroke*, *Sindroma Lupus Eritematosus* (SLE), dan penyakit kronis lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pelayanan obat program rujuk balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan obat program rujuk balik sebagaimana tercantum dalam formularium nasional.
- (3) Harga obat program rujuk balik yang ditagihkan kepada BPJS Kesehatan mengacu pada harga obat yang ditetapkan oleh Menteri ditambah biaya pelayanan kefarmasian.

- (4) Besarnya biaya pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari faktor pelayanan kefarmasian dikali harga obat yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Faktor pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:

Harga Dasar Satuan Obat	Faktor Pelayanan Kefarmasian
<Rp.50.000,00	0,28
Rp.50.000,00 sampai dengan Rp.250.000,00	0,26
Rp.250.000,00 sampai dengan Rp.500.000,00	0,21
Rp.500.000,00 sampai dengan Rp.1.000.000,00	0,16
Rp.1.000.000,00 sampai dengan Rp.5.000.000,00	0,11
Rp.5.000.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000,00	0,09
≥ Rp.10.000.000,00	0,07

Pasal 13

- (1) Tarif Non Kapitasi pelayanan pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:
 - a. pemeriksaan gula darah sewaktu;
 - b. pemeriksaan gula darah puasa (GDP);
 - c. pemeriksaan gula darah *Post Prandial* (GDPP);
 - d. pemeriksaan HbA1c; dan
 - e. pemeriksaan kimia darah, meliputi:
 - 1) *ureum*;
 - 2) *kreatinin*;
 - 3) kolesterol total;
 - 4) kolesterol LDL;
 - 5) kolesterol HDL;
 - 6) *trigliserida*.
- (2) Pemberian pelayanan pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan gula darah sewaktu, sesuai indikasi medis;
 - b. pemeriksaan gula darah puasa (GDP), 1 (satu) bulan 1 (satu) kali;
 - c. pemeriksaan gula darah *Post Prandial* (GDPP), 1 (satu) bulan 1 (satu) kali;
 - d. pemeriksaan HbA1c, 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan 1 (satu) kali;
 - e. pemeriksaan kimia darah, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - f. pemeriksaan urin analisis, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Tarif pelayanan pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis untuk:
 - a. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan sebesar

- Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- b. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - c. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) *ureum* sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - 2) *kreatinin* sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - 3) kolesterol total sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
 - 4) kolesterol LDL sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - 5) kolesterol HDL sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
 - 6) *trigliserida* sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan
 - 7) *microalbuminuria* sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Tarif Non Kapitasi skrining kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d diberikan terhadap pelayanan skrining kesehatan tertentu yang dilaksanakan secara bertahap dimulai dengan penilaian mandiri (*self assessment*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Dalam hal FKTP tidak memiliki sarana penunjang untuk penyelenggaraan pelayanan skrining kesehatan tertentu, FKTP wajib membangun jejaring dengan fasilitas penunjang yang sesuai.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan skrining kesehatan tertentu, BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan fasilitas penunjang yang sesuai.
- (4) Tarif pelayanan skrining kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan IVA paling tinggi sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. pemeriksaan *Pap Smear* paling tinggi sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. pemeriksaan gula darah sewaktu, pemeriksaan gula darah puasa (GDP), dan pemeriksaan gula darah *Post Prandial* (GDPP), masing-masing sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - d. pengambilan sampel untuk Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) tarifnya termasuk dalam paket tarif persalinan;
 - e. pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk skrining *thallasemia* sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah); dan
 - f. pemeriksaan *rectal touche* dan darah samar feses untuk skrining kanker usus sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 15

Tarif Non Kapitasi pelayanan terapi krio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e diberikan untuk pemeriksaan IVA positif sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Tarif Non Kapitasi pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- (2) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPJS Kesehatan berdasarkan kesepakatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana, dan/atau indeks kemahalan pada masing-masing wilayah.

Pasal 17

Tarif Non Kapitasi diberlakukan untuk pelayanan yang mencakup:

- a. masa hamil (*ante natal care*);
- b. persalinan;
- c. masa sesudah melahirkan (*post natal care*); dan
- d. pra rujukan akibat komplikasi.

Pasal 18

- (1) Pelayanan Kesehatan masa hamil (*ante natal care*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi;
 - a. 1 (satu) kali pada trimester pertama yang dilakukan oleh dokter beserta pemeriksaan ultrasonografi (USG);
 - b. 2 (dua) kali pada trimester kedua yang dapat dilakukan oleh dokter atau bidan; dan
 - c. 3 (tiga) kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh dokter atau bidan, dengan kunjungan kelima dilakukan oleh dokter beserta pemeriksaan USG.
- (2) Tarif Non Kapitasi pelayanan kesehatan masa hamil (*ante natal care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagi puskesmas:
 - 1) pemeriksaan masa hamil (*ante natal care*) dibayarkan per kunjungan sesuai dengan standar pelayanan masa hamil (*ante natal care*) sebesar:
 - a) Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pelayanan masa hamil (*ante natal care*) yang dilakukan oleh dokter disertai pelayanan USG;
 - b) Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk pelayanan masa hamil (*ante natal care*) yang dilakukan oleh dokter; atau

- c) Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk pelayanan masa hamil (*ante natal care*) yang dilakukan oleh bidan Puskesmas.
- b. pada bidan jejaring sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pelayanan masa hamil (*ante natal care*).
- (3) Dalam kondisi tertentu karena tidak ada dokter atau sarana pemeriksaan ultrasonografi (USG) dalam fasilitas kesehatan, pelayanan masa hamil (*ante natal care*) pada kunjungan trimester pertama dan kunjungan kelima di trimester ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. dilakukan oleh dokter tanpa pemeriksaan USG; atau
 - b. dilakukan oleh bidan.
- (4) Pembayaran untuk pelayanan masa hamil (*ante natal care*) dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap mengacu pada ketentuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Jasa pelayanan pra rujukan pada komplikasi kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d di puskesmas paling banyak sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Jasa pelayanan pra rujukan pada komplikasi kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d di FKTP selain puskesmas termasuk bidan jejaring paling banyak sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh:
 - a. tim paling sedikit 1 (satu) orang dokter dan 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan; atau
 - b. tim paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam kondisi tidak ada dokter pada fasilitas kesehatan untuk pelayanan persalinan tanpa komplikasi.
- (2) Tarif persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. yang dilakukan di puskesmas dibayarkan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); atau
 - b. yang dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan dalam kondisi tertentu dibayarkan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Pelayanan Kesehatan masa sesudah melahirkan (*Post Natal Care*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan bagi ibu; dan
 - b. pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir.
- (2) Pelayanan Kesehatan bagi ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali yang meliputi:
 - a. 1 (satu) kali pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 2 (dua) hari pascapersalinan;
 - b. 1 (satu) kali pada periode 3 (tiga) hari sampai dengan

- 7 (tujuh) hari pascapersalinan;
 - c. 1 (satu) kali pada periode 8 (delapan) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari pasca persalinan; dan
 - d. 1 (satu) kali pada periode 29 (dua puluh sembilan) hari sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pascapersalinan.
- (3) Pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali yang meliputi:
- a. 1 (satu) kali pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 2 (dua) hari pascapersalinan;
 - b. 1 (satu) kali pada periode 3 (tiga) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari pascapersalinan; dan
 - c. 1 (satu) kali pada periode 8 (delapan) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari pascapersalinan.
- (4) Tarif pelayanan untuk pemeriksaan masa sesudah melahirkan dilaksanakan dengan 3 (tiga) kali kunjungan ibu nifas dan bayi baru lahir serta 1 (satu) kali kunjungan ibu nifas keempat.
- (5) Tarif pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. bagi puskesmas, sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk setiap kunjungan; atau
 - b. bidan jejaring sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kunjungan.

Pasal 21

- (1) Tarif Non Kapitasi pelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h diberikan terhadap pelayanan yang meliputi:
- a. prapelayanan kontrasepsi;
 - b. tindakan pemberian pelayanan kontrasepsi; dan
 - c. pasca pelayanan kontrasepsi.
- (2) Tarif Non Kapitasi pelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
- a. untuk pemasangan dan/atau pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
 - b. untuk pemasangan dan/atau pencabutan implan, sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
 - c. untuk pelayanan suntik KB, sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap kali suntik;
 - d. untuk penanganan komplikasi KB, sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - e. untuk pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KBMOP)/vasektomi, sebesar Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Tarif Non Kapitasi pelayanan protesa gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i diberikan untuk pelayanan protesa gigi dengan ketentuan:
- a. dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dokter

- gigi; dan
 - b. untuk rahang gigi yang sama diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali sesuai indikasi medis.
- (2) Tarif Non Kapitasi pelayanan protesa gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan protesa gigi lengkap pada:
- a. 2 (dua) rahang gigi, maksimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - b. 1 (satu) rahang gigi, maksimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

BAB IV
PENCATATAN PENGESAHAN DANA NON KAPITASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 23

- (1) Pencatatan pengesahan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah dilakukan pengelolaan melalui tahapan:
- a. penganggaran;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan; dan
 - c. pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) FKTP milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan FKTP yang belum menerapkan pola Pengelolaan keuangan BLUD.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 24

- (1) Penganggaran Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan oleh kepala FKTP.
- (2) Kepala FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana pendapatan Dana Non Kapitasi JKN setiap tahunnya berdasarkan estimasi jumlah klaim pelayanan non kapitasi.
- (3) Rencana pendapatan Dana Non Kapitasi JKN setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana Non Kapitasi JKN pada setiap FKTP.
- (4) Rencana pendapatan Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala SKPKD dan kepala SKPD Dinas Kesehatan.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan rencana pendapatan Dana Non Kapitasi JKN setiap FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Kepala FKTP menyusun RKA-FKTP Dana Non Kapitasi JKN yang memuat rencana belanja Dana Non Kapitasi JKN.
- (2) Rencana belanja Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mempedomani pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipetakan dan diuraikan ke dalam program, kegiatan, subkegiatan dan belanja disesuaikan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) RKA-FKTP Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh kepala FKTP kepada kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 26

- (1) RKA-FKTP Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN;
 - b. pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN; dan
 - c. standar satuan harga.
- (2) Pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diuraikan berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diuraikan untuk jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota.
- (5) Ketentuan mengenai format RKA-FKTP Dana Non Kapitasi JKN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan rencana pendapatan Dana Non Kapitasi JKN setiap FKTP yang disampaikan oleh kepala FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Kepala SKPKD menyusun RKA-SKPKD yang memuat rencana penganggaran pendapatan Dana Non Kapitasi JKN.
- (2) Penganggaran pendapatan Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam akun pendapatan daerah, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, objek pendapatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP, rincian objek pendapatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP, sub rincian objek pendapatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP sesuai kode rekening berkenaan.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas Kesehatan setelah menerima RKA-FKTP Dana Non Kapitasi JKN dari kepala FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) menugaskan pejabat administrasi yang membidangi FKTP untuk melakukan penelaahan RKA-FKTP Dana Non Kapitasi JKN.
- (2) Penelaahan RKA-FKTP Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kesesuaian rencana pendapatan Dana Non Kapitasi JKN setiap FKTP dengan penyaluran anggaran tahun sebelumnya;
 - b. kesesuaian rencana pendapatan Dana Non Kapitasi JKN setiap FKTP dengan jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran Dana Non Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kesesuaian rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. kesesuaian rencana belanja Dana Non Kapitasi JKN dengan pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3); dan
 - e. kesesuaian satuan harga berdasarkan standar satuan harga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelaahan RKA-FKTP Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya dokumen RKA-FKTP Dana Non Kapitasi JKN secara lengkap.

Pasal 29

- (1) Pejabat administrasi yang membidangi FKTP melakukan rekapitulasi RKA-FKTP Dana Non Kapitasi JKN yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Berdasarkan hasil rekapitulasi RKA-FKTP Dana Non Kapitasi JKN yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menyusun RKA-SKPD.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana belanja Dana Non Kapitasi JKN yang diuraikan ke dalam program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota, subkegiatan operasional pelayanan puskesmas serta belanja berdasarkan kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai format RKA-SKPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 30

- (1) RKA-FKTP Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk dilakukan verifikasi.
- (2) TAPD menyampaikan kembali RKA-FKTP Dana Non Kapitasi JKN dan RKA-SKPD yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD sesuai dengan kewenangannya untuk dicantumkan dalam rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala Dinas Kesehatan melakukan penyempurnaan paling lama 2 (dua) hari.
- (4) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RKA-FKTP Dana Non Kapitasi JKN dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 31

- (1) Dalam hal rencana Penerimaan Dana Non Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Perda tentang APBD kabupaten/kota tidak sesuai dengan pembayaran Dana Non Kapitasi JKN setiap FKTP yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, pemerintah kota Gunungsitoli melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana Non Kapitasi JKN pada APBD.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) yang menyebabkan perubahan rencana belanja pada APBD, pemerintah kota Gunungsitoli melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana Non Kapitasi JKN pada APBD.
- (3) Dalam hal terdapat sisa Pengelolaan Dana Non Kapitasi JKN pada akhir tahun anggaran berkenaan, digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana Non Kapitasi JKN pada APBD.
- (4) Penyesuaian penganggaran alokasi Dana Non Kapitasi JKN pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan mengubah Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD mendahului Perda perubahan APBD.
- (5) Penetapan Peraturan Wali Kota mendahului Perda perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya dokumen penyesuaian penganggaran alokasi Dana Non Kapitasi JKN secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Materi muatan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimuat dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD.
- (7) Dalam hal tidak dilakukan penetapan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), materi muatan

- Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (8) Penetapan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberitahukan kepada pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli paling lama 1 (satu) bulan terhitung setelah Peraturan Wali Kota ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Kepala FKTP dapat melakukan perubahan belanja pada RKA-FKTP Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) untuk menyesuaikan pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan belanja RKA-FKTP Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada sub rincian objek dalam satu rincian objek, rincian objek belanja dalam satu objek, dan antar objek dalam satu jenis belanja pada RKA-FKTP Dana Non Kapitasi JKN.
- (3) Perubahan belanja RKA-FKTP Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi besaran alokasi pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN berdasarkan kebutuhan penggunaan jasa pelayanan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota atas usulan kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan belanja RKA-FKTP Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala FKTP dan disetujui oleh kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Perubahan belanja RKA-FKTP Dana Non Kapitasi JKN yang telah ditetapkan dan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh kepala FKTP kepada kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, Kepala Dinas Kesehatan menyusun rancangan DPA Dinas Kesehatan, serta kepala FKTP dan Bendahara Dana Non Kapitasi JKN membuka rekening Dana Non Kapitasi JKN atas nama FKTP.
- (2) Rekening Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digabung dengan Rekening Dana Kapitasi JKN.
- (3) Bendahara Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dirangkap oleh Bendahara kapitasi JKN atau bendahara pengeluaran pembantu pada Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas Kesehatan menyerahkan rancangan DPA Dinas Kesehatan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada PPKD untuk disahkan.
- (2) DPA Dinas Kesehatan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Non Kapitasi JKN.
- (3) Ketentuan mengenai format DPA Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 35

- (1) Pembukaan Rekening Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dilakukan pada bank yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal terdapat bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas Dana Non Kapitasi JKN yang disimpan pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya menjadi pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan DPA Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), kepala FKTP melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Dana Non Kapitasi JKN.
- (2) Kegiatan yang bersumber dari Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam RKA-FKTP Dana Non Kapitasi JKN dan DPA Dinas Kesehatan dengan memperhatikan pembayaran Dana Non Kapitasi JKN oleh BPJS Kesehatan.
- (3) Pembayaran Dana Non Kapitasi JKN oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disalurkan langsung kepada rekening Bendahara Dana Non Kapitasi JKN berdasarkan besaran klaim Dana Non Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diinformasikan oleh BPJS Kesehatan kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik yang dapat dicetak.

Pasal 37

Pembayaran Dana Non Kapitasi JKN oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) paling lambat 15 hari setelah berkas klaim dinyatakan

lengkap oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 38

- (1) Bendahara Dana Non Kapitasi JKN melaporkan penerimaan pembayaran Dana Non Kapitasi JKN oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) kepada kepala FKTP.
- (2) Kepala FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan penyaluran Dana Non Kapitasi JKN yang diterima dari BPJS Kesehatan kepada PPKD selaku BUD melalui kepala SKPD Dinas Kesehatan.
- (3) Berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dan laporan penyaluran Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD selaku BUD menerbitkan SP2DK.
- (4) Berdasarkan SP2DK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengakui realisasi pendapatan.
- (5) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan Kesehatan peserta JKN pada FKTP.
- (6) Ketentuan mengenai format SP2DK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 39

Pengadaan barang/jasa pada FKTP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 40

- (1) Bendahara Dana Non Kapitasi JKN melaksanakan pengeluaran belanja Dana Non Kapitasi JKN dengan melakukan tahapan:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh KPA beserta bukti transaksinya;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan Dana Non Kapitasi JKN.
- (2) Dalam hal tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Bendahara Dana Non Kapitasi JKN menolak permintaan pengeluaran belanja dari KPA.
- (3) Bendahara Dana Non Kapitasi JKN bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 41

- (1) Pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Non Kapitasi JKN dicatat oleh Bendahara Dana Non Kapitasi JKN pada buku kas umum dan buku pembantu.
- (2) Buku pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu panjar, buku pembantu pajak, dan buku pembantu per sub rincian objek belanja.

- (3) Buku kas umum dan buku pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan penutupan buku setiap akhir bulan.
- (4) Dalam hal terdapat pendapatan dan belanja lainnya selain Dana Non Kapitasi JKN, pencatatan dilakukan pada buku kas umum dan buku pembantu secara terpisah.
- (5) Ketentuan mengenai format buku kas umum dan buku pembantu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 42

- (1) Penutupan buku setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) ditandatangani oleh Bendahara Dana Non Kapitasi JKN dan kepala FKTP selaku KPA.
- (2) Penutupan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan bukti belanja yang sah dan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan buku kas umum dan buku pembantu yang telah ditandatangani Bendahara Dana Non Kapitasi JKN dan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Dana Non Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN.
- (4) Laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala FKTP setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), Bendahara Dana Non Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN setiap triwulan.
- (2) Laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jumlah anggaran, realisasi anggaran, dan sisa Dana Non Kapitasi JKN.
- (3) Ketentuan mengenai format laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN setiap triwulan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 44

- (1) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN setiap triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) kepada kepala SKPD Dinas Kesehatan melalui Bendahara Pengeluaran SKPD.

- (2) Laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala FKTP dan rekapitulasi pembelian barang milik daerah setiap triwulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai format surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan format rekapitulasi pembelian barang milik daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 45

- (1) Sisa Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP yang tidak digunakan seluruhnya pada akhir tahun anggaran, dilaporkan kepada PPKD selaku BUD melalui Dinas Kesehatan dan tetap di rekening Bendahara Dana Non Kapitasi JKN.
- (2) Sisa Pengelolaan Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui dan menjadi bagian SiLPA penerimaan pembiayaan pada APBD.
- (3) Pengakuan SiLPA penerimaan pembiayaan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah sisa Pengelolaan Dana Non Kapitasi JKN direviu oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Reviu oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Reviu oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk memvalidasi perhitungan besaran sisa Dana Non Kapitasi JKN dengan diuraikan berdasarkan sumber:
 - a. pelampauan pendapatan Dana Non Kapitasi JKN karena adanya perubahan peserta FKTP setelah rekonsiliasi dan sampai akhir tahun belum digunakan;
 - b. penghematan belanja;
 - c. kewajiban kepada pihak ketiga atau pihak lain sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan
 - d. sisa Dana Non Kapitasi JKN akibat tidak tercapainya capaian kinerja.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 46

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dimulai dengan pembuatan rekapitulasi laporan Penerimaan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN setiap FKTP berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN.
- (2) Pembuatan rekapitulasi laporan pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan.

- (3) Rekapitulasi laporan realisasi Penerimaan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD setiap triwulan.

Pasal 47

- (1) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menguji:
 - a. perhitungan laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN setiap triwulan;
 - b. kesesuaian belanja Dana Non Kapitasi JKN dengan RKA-FKTP Dana Non Kapitasi JKN, RKA-SKPD, DPA SKPD, dan informasi pendapatan Dana Non Kapitasi JKN berupa notifikasi dari BPJS Kesehatan; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana Non Kapitasi JKN oleh kepala FKTP.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, PPK-SKPD melalui Bendahara Pengeluaran SKPD mengembalikan laporan rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN setiap triwulan kepada kepala FKTP untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi.
- (4) Pengembalian laporan rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN setiap triwulan kepada kepala FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya hasil verifikasi.
- (5) Perbaikan atas hasil verifikasi oleh kepala FKTP melalui Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) hari setelah menerima pengembalian hasil verifikasi.

Pasal 48

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) telah sesuai, PPK-SKPD menyiapkan rancangan SP2B.
- (2) SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh PA paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah laporan rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN setiap triwulan terpenuhi.
- (3) SP2B yang ditandatangani oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada BUD untuk penerbitan SPB.
- (4) Ketentuan mengenai format SP2B tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 49

- (1) BUD meneliti kelengkapan dokumen SP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) yang diajukan oleh PA.
- (2) Kelengkapan dokumen SP2B yang diajukan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen:
 - a. laporan rekapitulasi pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN setiap triwulan untuk setiap FKTP; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana Non Kapitasi JKN oleh setiap kepala FKTP.
- (3) BUD menerbitkan SPB setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi paling lama 2 (dua) hari setelah menerima dokumen secara lengkap.
- (4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, BUD menolak menerbitkan SPB.
- (5) Penolakan penerbitan SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 1 (satu) hari setelah menerima dokumen SP2B dari PA.
- (6) Ketentuan mengenai format SPB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Dana Non Kapitasi JKN, Bendahara Dana Non Kapitasi JKN, PPK Unit SKPD, PPK-SKPD, BUD dan Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan rekonsiliasi atas realisasi pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN setiap semester.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (3) Dalam hal rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi perbedaan nominal jumlah Dana Non Kapitasi JKN antara Bendahara Dana Non Kapitasi JKN, PPK Unit SKPD, PPK-SKPD, BUD dan Bendahara Pengeluaran SKPD, dilakukan penyesuaian laporan pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai format berita acara rekonsiliasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 51

- (1) SPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), sebagai dokumen sumber pencatatan PPKSKPD dalam menyusun laporan keuangan SKPD Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam hal SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan aset tetap, aset lainnya dan barang persediaan berdasarkan hasil *stock opname* akhir tahun, diakui dan dicatat sebagai barang milik daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V REKONSILIASI PENERIMAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 52

- (1) Berdasarkan rekonsiliasi atas realisasi pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Kepala PPKD selaku BUD dan kepala SKPD Dinas Kesehatan melakukan rekonsiliasi data pembayaran Dana Non Kapitasi JKN kepada FKTP bersama BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rekonsiliasi atas realisasi pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN setiap semester.
- (2) Rekonsiliasi data pembayaran Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memvalidasi:
 - a. data jumlah peserta yang terdaftar di FKTP; dan
 - b. kebutuhan pembayaran Dana Non Kapitasi JKN.
- (3) Memvalidasi data jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan data peserta yang mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan yang telah memiliki nomor identitas peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan data berdasarkan hasil validasi data jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyesuaian data pada bulan berikutnya setelah rekonsiliasi dilaksanakan.
- (5) Memvalidasi kebutuhan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan data realisasi pembayaran Dana Non Kapitasi JKN oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Non Kapitasi JKN.
- (6) Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diperhitungkan dalam pembayaran Dana Non Kapitasi JKN pada bulan berikutnya setelah rekonsiliasi dilaksanakan.

Pasal 53

- (1) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dimuat dalam berita acara rekonsiliasi.
- (2) Berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh kepala PPKD selaku BUD, kepala SKPD Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
- (3) Dalam hal hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan rencana pendapatan Dana Non Kapitasi JKN setiap tahunnya berdasarkan alokasi penyaluran Dana Non Kapitasi JKN tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran pada APBD.
- (4) Penyesuaian penganggaran pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku mutatis muntandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

- (5) Ketentuan mengenai format berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 24 Oktober 2023

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 24 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RAHMAT KASIH ZEBUA, SH, M.Si
PENATA TK.I
NIP. 19881107 201101 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 29 TAHUN 2023
TANGGAL : 24 OKTOBER 2023
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DARI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SE-KOTA GUNUNGSITOLI

1. FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN FKTP DANA (RKA-FKTP DANA)

Nama FKTP :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Sumber Dana : Dana Non Kapitasi

KODE REKENING	PEMANFAATAN	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)	TRIWULAN			
			VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui,
Kepala SKPD

Menyetujui,
Kepala FKTP,

Bendahara Dana Non
Kapitasi JKN,

.....
NIP.....

.....
NIP.

.....
NIP.

- Tata Cara Pengisian Format RKA-FKTP Dana Non Kapitasi:
- 1. Kolom 1, diisi dengan kode rekening antara lain kode rekening belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa serta belanja modal;
 - 2. Kolom 2, diisi dengan pemanfaatan belanja Dana Non Kapitasi, penggunaan jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. Kolom 3, diisi uraian berupa belanja pegawai, belanja belanja barang dan jasa serta belanja modal;
 - 4. Kolom 4, diisi dengan volume (jumlah dapat berupa jumlah orang/pegawai dan barang satuan);
 - 5. Kolom 5, diisi dengan satuan (unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya);

6. Kolom 6, diisi dengan harga satuan yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan berupa tarif, harga, dan sebagainya;
7. Kolom 7, diisi dengan jumlah rencana belanja Dana Non Kapitasi (volume kali harga satuan).
8. Kolom 8, 9,10 dan 11 diisi jumlah rencana belanja pada tiap triwulan.

2. FORMAT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) DINAS KESEHATAN

Halaman :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR
RKA-SKPD 2.2.1

KABUPATEN / KOTA
Tahun Anggaran

URUSAN PEMERINTAHAN : 1

BIDANG URUSAN : 1.02.

PROGRAM : 1.02.02

KEGIATAN : 1.02.02.2.02.

ORGANISASI :

UNIT :

Alokasi Tahun n - 1 : Rp -

Alokasi Tahun n : Rp -

Alokasi Tahun n + 1 : Rp -

URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Masukan

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas

Sumber Pendanaan : Dana Kapitasi JKN

Lokasi Keluaran Sub Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : Mulai Sampai

Keterangan :

KODE REKENING

U R A I A N

Rincian Penghitungan

Koef/Volume

Satuan

Harga

PPN

Jumlah (Rp)

1

2

3

4

5

6

5

5 1

5 1 01

BELANJA DAERAH

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

#

- UPT PUSKESMAS A

- UPT PUSKESMAS B

- UPT PUSKESMAS C

- dst

5 1 02

Belanja Barang dan Jasa

#

- UPT PUSKESMAS A

- UPT PUSKESMAS B

- UPT PUSKESMAS C

- dst

5 2

5 2 05

BELANJA MODAL

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

#

- UPT PUSKESMAS A

- UPT PUSKESMAS B

- UPT PUSKESMAS C

- dst

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

NO

NAMA

NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

1

2

3

dst

3. FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) DINAS KESEHATAN

Halaman :

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN				FORMULIR DPA-		
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				RINCIAN		
				BELANJA SKPD		
KABUPATEN / KOTA						
Tahun Anggaran						
NOMOR DPA :						
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN PELAYANAN DASAR						
BIDANG URUSAN : 1.02. URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN						
PROGRAM : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
KEGIATAN : 1.02.02.2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota						
ORGANISASI : DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA						
UNIT :						
Alokasi Tahun n - 1 : Rp -						
Alokasi Tahun n : Rp -						
Alokasi Tahun n + 1 : Rp -						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan						
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas						
Sumber Pendanaan : Dana Kapitasi JKN						
Lokasi Keluaran Sub Kegiatan :						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Sampai						
Keterangan :						
KODE REKENING	U R A I A N	Rincian Penghitungan				Jumlah (Rp)
1	2	Koef/Volume	Satuan	Harga	PPN	6
5	BELANJA DAERAH		3	4	5	
5 1	BELANJA OPERASI					
5 1 01	Belanja Pegawai					
	#					
	- UPT PUSKESMAS A					
	- UPT PUSKESMAS B					
	- UPT PUSKESMAS C					
	- dst					
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					
	#					
	- UPT PUSKESMAS A					
	- UPT PUSKESMAS B					
	- UPT PUSKESMAS C					
	- dst					
5 2	BELANJA MODAL					
5 2 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
	#					
	- UPT PUSKESMAS A					
	- UPT PUSKESMAS B					
	- UPT PUSKESMAS C					
	- dst					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp	, tanggal Pengguna Anggaran Nama NIP Mengesahkan, PPKD Nama NIP				
Februari	Rp					
Maret	Rp					
April	Rp					
Mei	Rp					
Juni	Rp					
Juli	Rp					
Agustus	Rp					
September	Rp					
Oktober	Rp					
November	Rp					
Desember	Rp					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :						
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN		
1						
2						
3						
dst						

4. FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DANA NON KAPITASI (SP2DK)

GO DAERAH	LO	SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DANA NON KAPITASI (SP2DK)
Kode Rekening :.....01)		Nama BUD :.....02) Tanggal :.....03) Nomor :.....04) Tahun Anggaran :.....05)
Telah disahkan pendapatan Dana Non Kapitasi JKN sejumlah : Rp.....6) (..... dalam huruf.....07)		
....., tanggal 08) 09) 10) NIP.....11)		

- Tata Cara Pengisian Format SP2DK:
1. Diisi dengan nomor kode rekening pendapatan Dana Non Kapitasi JKN;
 2. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD;
 3. Diisi tanggal penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Non Kapitasi (SP2DK);
 4. Diisi dengan nomor penerbitan SP2DK
 5. Diisi dengan tahun anggaran penerbitan SP2DK;
 6. Diisi dengan jumlah penerimaan pendapatan Dana Non Kapitasi JKN;
 7. Diisi dengan jumlah penerimaan pendapatan Dana Non Kapitasi JKN dalam huruf;
 8. Diisi dengan nama kota tempat dan tanggal penerbitan SP2DK;
 9. Diisi dengan nama Jabatan (BUD/Kuasa BUD);
 10. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD; dan
 11. Diisi dengan NIP BUD/Kuasa BUD yang bersangkutan.

5. FORMAT BUKU KAS DAN BUKU PEMBANTU

a. FORMAT BUKU KAS UMUM

Bulan: 1
Nama FKTP : 2)
Desa/Kelurahan : 3)
Kecamatan : 3)
Kabupaten/Kota : 4)
Provinsi : 5)

NO.	TANGGAL	KODE REKENING	NOMOR BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8

Saldo BKU Bulan..... 1) sebesar.....6) Terdiri
dari :
Saldo Tunai :..... 7)
Saldo Bank :..... 8)

Mengetahui, ...10)
Kepala FKTP....., 9) Bendahara Dana Non Kapitasi
JKN,

.....
NIP. NIP.

- Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Kas:
1. Diisi dengan nama bulan;
 2. Diisi dengan nama FKTP;
 3. Diisi dengan nama desa/kelurahan dan kecamatan;
 4. Diisi dengan nama kabupaten/kota;
 5. Diisi dengan nama provinsi;
 6. Diisi dengan jumlah saldo BKU;
 7. Diisi dengan jumlah saldo tunai di kas Bendahara Dana Non Kapitasi JKN;
 8. Diisi dengan jumlah saldo di rekening Dana Non Kapitasi JKN;
 9. Diisidengan nama kepala FKTP;
 10. Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun;
 11. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
 12. Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi Dana Non Kapitasi JKN;
 13. Kolom 3, diisi dengan kode rekening;
 14. Kolom 4, diisi dengan nomor bukti dokumen/surat pertanggungjawaban yang sah (Bukti SPJ);
 15. Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi Dana Non Kapitasi JKN;
 16. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah Dana Non Kapitasi JKN yang diterima Bendahara Dana Non Kapitasi JKN;
 17. Kolom 7, diisi dengan rupiah Dana Non Kapitasi JKN yang dikeluarkan Dana Non Kapitasi JKN;

18. Kolom 8, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah penerimaan atau pengeluaran pada saat transaksi.

b. FORMAT BUKU PEMBANTU KAS

Bulan:..... 1)

Nama FKTP : 2)
Desa/Kelurahan : 3)
Kecamatan : 3)
Kabupaten/Kota : 4)
Provinsi : 5)

NO.	TANGGAL	KODE BKU	NOMOR BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8

Mengetahui, ... 7)
Kepala FKTP....., 6) Bendahara Dana Non Kapitasi JKN,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Kas:

1. Diisi dengan nama bulan;
2. Diisi dengan nama FKTP;
3. Diisi dengan nama desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Diisi dengan nama kabupaten/kota;
5. Diisi dengan nama provinsi;
6. Diisi dengan nama FKTP;
7. Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;
8. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
9. Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi Dana Non Kapitasi JKN;
10. Kolom 3, diisi dengan kode BKU;
11. Kolom 4, diisi dengan Nomor Bukti Dokumen/Surat Pertanggungjawaban Yang Sah (Bukti SPJ);
12. Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi Dana Non Kapitasi JKN;
13. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah Dana Non Kapitasi yang diterima bendahara Dana Non Kapitasi JKN;
14. Kolom 7, diisi dengan rupiah Dana Non Kapitasi yang dikeluarkan Dana Non Kapitasi JKN;
15. Kolom 8, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah penerimaan atau pengeluaran pada saat transaksi.

c. FORMAT BUKU PEMBANTU BANK

Bulan: 1)

Nama FKTP : 2)
Desa/Kelurahan : 3)

Kecamatan : 3)
Kabupaten/Kota : 4)
Provinsi : 5)

NO.	TANGGAL	KODE BKU	NOMOR BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8

Mengetahui,
Kepala FKTP, 6)

.....
NIP.

....., ... 7)

Bendahara Dana Non
Kapitasi JKN,

.....
NIP.

Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Bank:

- 1. Diisi dengan nama bulan;
- 2. Diisi dengan nama FKTP;
- 3. Diisi dengan nama desa/kelurahan dan kecamatan;
- 4. Diisi dengan nama kabupaten/kota;
- 5. Diisi dengan nama provinsi;
- 6. Diisi dengan nama FKTP;
- 7. Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;
- 8. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
- 9. Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi Dana Non Kapitasi JKN;
- 10. Kolom 3, diisi dengan kode BKU;
- 11. Kolom 4, diisi dengan Nomor Bukti Dokumen/Surat Pertanggungjawaban Yang Sah (Bukti SPJ);
- 12. Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi Dana Non Kapitasi;
- 13. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah Dana Non Kapitasi JKN yang diterima bendahara Dana Non Kapitasi JKN;
- 14. Kolom 7, diisi dengan jumlah rupiah Dana Non Kapitasi JKN yang dikeluarkan Dana Non Kapitasi JKN;
- 15. Kolom 8, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah penerimaan atau pengeluaran pada saat transaksi.

d. FORMAT BUKU PEMBANTU PAJAK

Bulan:..... 1)

Nama FKTP : 2)
Desa/Kelurahan : 3)
Kecamatan : 3)
Kabupaten/Kota : 4)
Provinsi : 5)

NO.	TANGGAL	KODE BKU	NOMOR BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8

Mengetahui, ...7)
Kepala FKTP.....,6) Bendahara Dana Non Kapitasi JKN,

.....
NIP.
.....
NIP.

Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Pajak:

- 1. Diisi dengan nama bulan;
- 2. Diisi dengan namas ekolah;
- 3. Diisi dengan nama desa/kelurahan dan kecamatan;
- 4. Diisi dengan nama kabupaten/kota;

5. Diisi dengan nama provinsi;
6. Diisi dengan nama FKTP;
7. Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;
8. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
9. Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi Dana Non Kapitasi JKN;
10. Kolom 3, diisi dengan kode BKU;
11. Kolom 4, diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan atau Penyetoran Pajak;
12. Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi Dana Non Kapitasi JKN;
13. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah pemotongan pajak;
14. Kolom 7, diisi dengan jumlah rupiah penyetoran pajak;
15. Kolom 8, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah penerimaan atau pengeluaran pada saat transaksi.

e. **FORMAT BUKU PEMBANTU RINCIAN OBJEK BELANJA**

Bulan:..... 1)

Nama FKTP : 2)
 Desa/Kelurahan : 3)
 Kecamatan : 3)
 Kabupaten/Kota : 4)
 Provinsi : 5)
 Kode dan Nama Rekening : 6)
 Anggaran Belanja : 7)

TANGGAL	KODE BKU	URAIAN	REALISASI	JUMLAH	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	7	6

Mengetahui, ...9)
 Kepala FKTP.....,8) Bendahara Dana Non Kapitasi JKN,

.....
 NIP. NIP.

Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Rincian Objek Belanja:

1. Diisi dengan nama bulan;
2. Diisi dengan nama FKTP;
3. Diisi dengan nama desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Diisi dengan nama kabupaten/kota;
5. Diisi dengan nama provinsi;
6. Diisi dengan kode dan nama rekening;
7. Diisi dengan jumlah anggaran belanja;
8. Diisi dengan nama FKTP;
9. Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;
10. Kolom 1, diisi dengan tanggal transaksi;
11. Kolom 2, diisi dengan kode BKU;
12. Kolom 3, diisi uraian transaksi;
13. Kolom 4, diisi dengan realisasi belanja berdasarkan nilai transaksi;

14. Kolom 5, diisi dengan jumlah sebelumnya ditambah realisasi transaksi;
15. Kolom 6, diisi dengan anggaran dikurangi jumlah.

6. FORMAT LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA DANA JKN SETIAP TRIWULAN

Kepada Yth. PPKD selaku BUD
Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana Non Kapitasi JKN untuk triwulan 1) tahun 2) sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi s/d triwulan sebelumnya (Rp)	Realisasi triwulan ini (Rp)	Jumlah Realisasi s/d triwulan Ini (Rp)	Selisih /Kurang (Rp)
	Penerimaan	*)				
	Jumlah					
	Pengeluaran:					
	a. Belanja Pegawai	**)				
	b. Belanja Barang dan Jasa	**)				
	c. Belanja Modal:	**)				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**)				
	Jumlah					

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya. Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal 3)
Kepala FKTP 4)

.....
NIP.

- Tata Cara Pengisian Format Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana Non Kapitasi JKN Triwulan:
1. Diisi dengan triwulan berkenaan;
 2. Diisi dengan tahun anggaran berkenaan;
 3. Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;
 4. Diisi dengan nama FKTP;
- *) diisi berdasarkan alokasi Dana Non Kapitasi JKN dan Sisa Dana Non Kapitasi JKN yang ada di rekening bendahara JKN yang menjadi SiLPA;
- **)diisi berdasarkan alokasi belanja yang tercantum dalam RKA-FKTP Dana Non Kapitasi.

7. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DAN REKAPITULASI PEMBELIAN BARANG MILIK DAERAH

a. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor:(1)

- 1. Nama FKTP (2)
- 2. Nomor/tanggal DPA-SKPD (3)
- 3. Sub Kegiatan Dana Non Kapitasi (4)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana Non Kapitasi serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana Non Kapitasi pada triwulan(5) tahun anggaran(6) dengan rincian sebagai berikut: A. Saldo Awal Dana Non Kapitasi (7) Rp.

- B. Penerimaan Dana Non Kapitasi (8)
 - 1. Bulan I Rp.
 - 2. Bulan II dst Rp. Jumlah
 - Penerimaan Rp.
- C. Pengeluaran Dana Non Kapitasi
 - 1. Jenis Belanja Pegawai Rp.
 - 2. Jenis Belanja Barang dan Jasa Rp.
 - 3. Jenis Belanja Modal Rp.
 - Jumlah Rp.
- D. Sisa Dana Non Kapitasi (A+B-C) Rp.
Terdiri atas:
 - 1. Sisa Kas Tunai Rp.
 - 2. Sisa di Bank Rp.

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf C disimpan pada FKTP.....(9) untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila buktibukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(10)
Kepala FKTP.....(11)
.....
NIP.....

- Tata Cara Pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak:
- 1. Diisi dengan nomor SPTJM FKTP;
 - 2. Diisi nama FKTP;
 - 3. Diisi Nomor dan tanggal DPA-SKPD yang bersangkutan;
 - 4. Diisi kode kegiatan Dana Non Kapitasi JKN;
 - 5. Diisi dengan triwulan berkenaan;
 - 6. Diisi dengan tahun anggaran berkenaan;
 - 7. Diisi dengan saldo awal Dana Non Kapitasi JKN;
 - 8. Diisi penerimaan Dana Non Kapitasi JKN per bulan;
 - 9. Diisi nama FKTP;
 - 10. Diisi tempat dan tanggal diterbitkannya SPTJM; dan

11. Diisi Nama dan NIP Kepala FKTP.

b. FORMAT REKAPITULASI PEMBELIAN BARANG MILIK DAERAH DARI DANA NON KAPITASI FKTP

Nama FKTP : 1)
Desa/Kelurahan : 2)
Kecamatan : 2)
Kabupaten/Kota : 3)
Provinsi : 4)

No.	NAMA BARANG MILIK DAERAH	JUMLAH UNIT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5

Mengetahui, ...6)

Kepala FKTP....5) Bendahara Dana Non Kapitasi JKN

.....
NIP.
.....
NIP.

Tata Cara Pengisian Format Rekapitulasi Pembelian Barang Milik Daerah:

- 1. Diisi dengan nama FKTP;
- 2. Diisi dengan nama desa/kelurahan dan kecamatan;
- 3. Diisi dengan nama kabupaten/kota;
- 4. Diisi dengan nama provinsi
- 5. Diisi dengan nama FKTP;
- 6. Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun;
- 7. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
- 8. Kolom 2, diisi dengan nama barang milik daerah;
- 9. Kolom 3, diisi dengan jumlah unit; 10. Kolom 4, diisi dengan harga satuan;
- 11. Kolom 5, diisi dengan jumlah.

8. FORMAT SP2B DANA NON KAPITASI FKTP

a. FORMAT SP2B

SKPD DINAS KESEHATAN (01) SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA (SP2B) Tanggal: (02) Nomor: (03)			
Kepala SKPD Dinas Kesehatan (04) memohon kepada:			
BUD selaku PPKD			
agar mengesahkan dan membukukan penerimaan dan belanja Non Kapitasi sejumlah			
1. Saldo Awal		Rp. (05)	
2. Pendapatan		Rp. (06)	
3. Belanja		Rp. (07)	
a) Belanja Pegawai		Rp.	
b) Belanja Barang dan Jasa		Rp.	
c) Belanja Modal		Rp.	
4. Saldo Akhir		Rp. (08)	
Untuk Triwulan (09) Tahun Anggaran (10)			
Dasar Pengesahan:		Urusan Organisasi	
(11) (12)			
Program, Kegiatan, SubKegiatan xx. xx. (13)			
PENERIMAAN		BELANJA	
..... (14)		Kode Rekening	Jumlah
		 (16)	 (17)
Jumlah Penerimaan	Rp. (15)	Jumlah Belanja	Rp. (18)
(19) , tanggal seperti di atas			
Kepala SKPD Dinas Kesehatan ... (20)			

	
	NIP. (21)

Tata Cara Pengisian Format Lampiran SP2B, Rekapitulasi Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana Non Kapitasi JKN Setiap Triwulan:

1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
2. Kolom 2, diisi dengan FKTP;
3. Kolom 3, diisi dengan jumlah rupiah saldo awal;
4. Kolom 4, diisi dengan jumlah rupiah pendapatan Dana Non Kapitasi JKN);
5. Kolom 5, diisi dengan jumlah rupiah total penerimaan (saldo awal + pendapatan);
6. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah belanja pegawai;
7. Kolom 7, diisi dengan jumlah rupiah belanja barang dan jasa;
8. Kolom 8, diisi dengan jumlah rupiah belanja modal;
9. Kolom 9, diisi dengan jumlah rupiah total belanja (belanja pegawai + belanja barang dan jasa + belanja modal); dan
10. Kolom 10, diisi dengan jumlah rupiah saldo akhir (total penerimaan – total belanja).

9. FORMAT SPB DANA NON KAPITASI JKN

LOGO DAERAH	SURAT PENGESAHAN BELANJA (SPB) Dinas Kesehatan Nama BUD :.....04) Tanggal :.....05) Nomor :.....06) Tahun Anggaran :.....07)
Nomor SP2B Dinas Kesehatan :....01) Tanggal :.....02) Kode Organisasi :.....03)	
Telah disahkan belanja sejumlah: Belanja: Belanja Pegawai Rp.....9) Belanja Barang dan Jasa Rp.....10) Belanja Modal Rp.....11) Saldo Akhir Rp.....12)	
....., tanggal 13) 14)	
..... 15)	
NIP.....16)	

- Tata Cara Pengisian Format SPB Dana Non Kapitasi JKN:
- 1. Diisi dengan nomor SP2B Dinas Kesehatan kabupaten/kota;
 - 2. Diisi dengan tanggal SP2B;
 - 3. Diisi dengan kode organisasi yang bersangkutan;
 - 4. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD;
 - 5. Diisi tanggal penerbitan SPB Dinas Kesehatan kabupaten/kota;
 - 6. Diisi dengan nomor penerbitan SPB Dinas Kesehatan kabupaten/kota
 - 7. Diisi dengan tahun anggaran penerbitan SPB Dinas Kesehatan kabupaten/kota;
 - 8. Diisi dengan jumlah saldo awal yang tercantum dalam SPB Dinas Kesehatan kabupaten/kota;
 - 9. Diisi dengan jumlah belanja pegawai yang tercantum dalam SPB Dinas Kesehatan kabupaten/kota;
 - 10. Diisi dengan jumlah belanja barang dan jasa yang tercantum dalam SPB Dinas Kesehatan kabupaten/kota;
 - 11. Diisi dengan jumlah belanja modal yang tercantum dalam SPB Dinas Kesehatan kabupaten/kota;
 - 12. Diisi dengan jumlah saldo akhir yang tercantum dalam SPB Dinas Kesehatan kabupaten/kota;
 - 13. Diisi dengan nama kota tempat dan tanggal penerbitan SPB Dinas Kesehatan kabupaten/kota;
 - 14. Diisi dengan nama Jabatan (BUD/Kuasa BUD) kabupaten/kota;
 - 15. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD kabupaten/kota; dan
 - 16. Diisi dengan NIP BUD/Kuasa BUD kabupaten/kota.

10. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DANA NON KAPITASI FKTP

BERITA ACARA REKONSILIASI
SALDO DANA NON KAPITASI JKN TRIWULAN 1)
TAHUN ANGGARAN..... 2)

SKPD : 3)
Kab/Kota : 4)
Provinsi : 5)

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun..... 6) telah dilaksanakan rekonsiliasi atas saldo awal dan saldo akhir Dana Non Kapitasi JKN untuk periode triwulan ... 1) tahun 2), dengan uraian sebagai berikut:

SALDO AWAL DANA NON KAPITASI TAHUN 2)	CATATAN
1. Saldo Rekening Bank Rp..... 2. Saldo Kas Tunai Rp..... Jumlah Saldo Dana Non Kapitasi Rp.....	
MUTASI DANA NON KAPITASI TRIWULAN 1) TAHUN 2)	
A. Mutasi Penambahan Rp..... 1. Alokasi Dana JKN Rp..... 2. Bunga Bank/Jasa Giro Rp..... 3. Potongan dan Pungutan Pajak Rp..... Jumlah Mutasi Penambahan Rp..... B. Mutasi Pengurangan Rp..... 1. Belanja Pegawai Rp..... 2. Belanja Barang dan Jasa Rp..... 3. Belanja Modal Rp..... 4. Setoran Pajak Rp..... Jumlah Mutasi Pengurangan Rp.....	
SALDO AKHIR DANA NON KAPITASI JKN TRIWULAN 1) TAHUN .. 2)	
1. Saldo Rekening Bank (.....) Rp..... 2. Saldo Kas Tunai (.....) Rp..... Jumlah Saldo Akhir Rp.....	
Rincian masing-masing FKTP terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.	
PETUGAS REKON	PARAF

1. Kuasa BUD 2. PPK-SKPD 3. Bendahara Pengeluaran SKPD	1. 2. 3.	
MENYETUJUI	PARAF	
1. Kepala SKPD 2. BUD	1. 2.	

Tata Cara Pengisian:

- 1. Diisi dengan tahap berkenaan;
- 2. Diisi dengan tahun anggaran berkenaan;
- 3. Diisi dengan nama SKPD yang membidangi fungsi kesehatan;
- 4. Diisi dengan nama kabupaten/kota;
- 5. Diisi dengan nama provinsi.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA